Nusa Bali



Anggota Dewan Divonis Bebas

★ Kasus Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi di Jembrana

JPU, Suhadi mengatakan masih pikirpikir atas putusan hakim, sementara Sueca langsung mengucapkan syukur atas putusan majelis hakim itu.

DENPASAR, NusaBali

Anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara yang didakwa melakukan korupsi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi akhirnya divonis tidak bersalah dan lepas dari tuntutan hukum pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (27/10). Putusan ini sama dengan putusan sebelumnya dalam kasus yang sama dengan terdakwa Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Jembrana, Ni Made Ayu Ardini. Dalam putusannya, majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili menyatakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dakwaan primer pasal 2 dan subsidair pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya memutuskan terdakwa Sueca yang merupakan politisi PDIP ini dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pidana tipikor.

"Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari penahanan kota, juga dipulihkan harkat dan martabatnya, serta membebankan biaya perkara kepada negara," tegas majelis hakim dalam amar putusannya.

Usai sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhadi yang ditemui mengatakan masih pikirpikir atas putusan hakim tersebut. Sementara Sueca langsung mengucapkan syukur atas putusan majelis hakim ini. "Terima kasih atas semua dukungannya," ujar Sueca singkat sambil langsung menuju mobilnya.

Sebelumnya, dalam tuntutan

Edisi : Rabu, 28 Oct 2011-

hal?

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

NusaBalf





TERDAKWA I Made Sueca Antara (kiri) saat jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, beberapa waktu lalu.

DOK.NUSAB

intah berupa penyediaan alokasi belanja BBM yang dananya bersumber dari APBN. Dalam penyaluran dana alokasi BBM bersubsidi itu untuk usaha mikro. UD Sumber Maju salah satu perusahaan yang mengajukan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu ke Disperindag kop Jembrana.

Tentu perusahaan harus memenuhi syarat guna mendapatkan rekomendasi tersebut. Pengurusan kemudian dimandatkan pada saksi Djuhari Juwono. Namun saksi tidak mampu menyelesaikan, sehingga saksi minta bantuan Gusti Komang Sudiardana.

Hingga akhirnya Komang Sudiardana mendapatkan sarat rekomendasi dan verifikasi. Surat tersebut diterbitkan oleh Kadisperindagkop, Ni Made Ayu Ardini, tetapi sebenarnya UD Sumber Maju tidak berhak mendapatkan rekomendasi pembelian BBM karena kriteria usahanya adalah usaha kecil sedang. Namun yang berhak sejatinya adalah usaha mikro.

Berdasarkan rekomendasi itu, perusahaan itu diberikan hak membeli solar bersubsidi 300 liter per hari. Meskipun surat rekomendasi tidak dikirimkan ke SPBU yang memberikan solar. Akibatnya, perusahaan milik terdakwa berhasil membeli BBM sebanyak 45.449,54 liter dengan nilai 261.248.412 atau 261 juta lebih. Nilai itu juga yang menjadi kerugian negara. 🖮 rez

Edisi	:	Rabu,	28	out	2015
	-	A 25-112-20-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

USSB815



yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhadi, tercakwa dinyatakan bersalah sesuai pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, JPU langsung membacakan tuntutannya yaitu menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun) Selain itu, anggota DPRD Jembrana dari Fraksi PDIP ini juga diminta membayar denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara ditambah mengembalikan kerugian negara Rp 122 juta.

Dengan ketentuan jika setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap tetap tidak mampu dibayar, maka harta bendanya akan dilelang. Jika masih belum mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Sementara dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa terdakwa pemilik sekaligus penanggungjawab perusahaan UD Sumber Maju. Dan, pada kisaran 2012 akhir hingga tahun 2013 bertempat di Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana, terdakwa diduga melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Modus yang dilakukan, yakni

Modus yang dilakukan, yakni saat ada pada tahun anggaran 2012 terdapat program pemer-

.

Edisi	: Raby, 28	Olef	7106	
Hal	:5		L.	

TISE BEIG



Dana Bansos Kelompok Tani Ternak Diduga Disunat

SINGARAJA, NusaBali

SINGARAJA, NusaBali Dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk Kelompok Tani Ternak Manik Sari, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng diduga disunat.

Sinyalemen ini mencuat setelah dana bansos itu sudah cair 100 persen. Namun fakta di lapangan, justru dana tersebut tidak semua digelontorkan ke kelompok tersebut. Sehingga, terlihat ada perbedaan realisasi angka bansos, dengan nominal yang seharusnya dicairkan. Informasi yang dihimpun, Selasa (27/10), pencairan yang tidak tepat sasaran itu, pada intinya, tidak seluruhnya diberikan kepada kelompok tersebut. "Dana sudah cair 100 persen, tapi tidak semua diberikan ke kelompok tersebut," ucap sumber yang enggan disebut namanya kemarin. namanya kemarin.

Bahkan, sudah hampir dua bulan belum ada LPJ. Bansos itu cair, berawal dari proposal permohonan dana bansos yang dibuat 3 Juni 2014 lalu, kelompok ini mengajukan dana bansos senilai Rp 59,5 juta. Dana itu untuk membeli tujuh ekor sapi, yang masing-masing Rp 6 juta dengan nilai total Rp 42 juta. Berikutnya juga tertuang, untuk membeli tujuh ekor bibit babi yang satu ekornya Rp 1 juta dengan total nilai Rp 7 juta, dan pakan ternak senilai Rp 10.5 juta senilai Rp 10,5 juta.

Singkatnya, dana tersebut akhirnya cair pada 26 Agustus 2015 dengan nilai Rp 59,5 juta melalui reken-ing tabungan bank. Be ikutnya dari rekening tersebut tercatat dana diambil pada 11 September dengan nilai

Dana inilah yang diduga diambil oknum tersebut. Sementara dari total dana itu, hanya Rp 10,5 juta untuk kelompok tersebut. Dana itu diduga digunakan untuk membeli beberapa ekor ternak saja dari yang telah diajukan dalam prop

Namun Ketua Kelompok Tani Ternak Manik Sari, Wayan Sumana, membantah dana bansos digunakan tidak dengan semestinya. "Dana yang diambil senilai Rp 49,5 juta itu untak pengadaan sebagian besar bibit ternak yang diajukan dalam proposal," ungkap Sumana.

Dana itu rincianr ya untuk pengadaan bibit sapi lima ekor, bibit babi tujuh ekor dan pakan ternak. Untuk yang kedua diambil Rp 10 juta untuk pengadaan lagi dua ekor bibit sapi. Sumana mengklaim, semua permohonan yang diajukan dalam proposal sudah direalisasikan pada waktu dana cair. "Sudah terealisasi semua. Dan, untuk waktu dana cair. "Sudah terealisasi semua. Dan, untuk Laporan Pertanggungjawaban saya akan selesaikan pertengahan Nopember. Kini masih kumpulkan kuitansinya dulu," kata Sumana.

Bahkan, sudah aca petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Buleleng mengecek realisasi bansos tersebut pada Jumat (23/10) lalu. Waktu itu itu dia tunjukkan sapi-sapinya hasil dari memperoleh bansos. Sementara Kepala Distanak Buleleng, Nyoman Swatantra belum bisa dikonfirmasi karena ponselnya dalam kondisi tidak aktif saat dihubungi. de

Edisi : Rasy, 28 out 201 Hal

NusaBali



Hari Ini, 14 Tersangka Korupsi SPPD Fiktif Gianyar Dilimpahkan

DENPASAR, NusaBali

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, Herdian Rahardi memastikan pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Pemkab Gianyar yang menyeret 14 orang sebagai tersangka akan dilakukan hari ini, Rabu (28/10).

Ditemui di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (27/10), Herdian mengatakan setelah sempat tertunda, pelimpahan tahap II, yaitu pelimpahan barang bukti dan tersangka dari Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akan dilakukan hari ini Rabu. "Besok (hari ini, red) pasti dilimpahkan," jelasnya.

Namun Herdian belum mau

Namun Herdian belum mau berkomentar apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Pasalnya itu merupakan kewenangan penyidik yang masih akan melakukan koordinasi setelah pelimpahan dari kepolisian. "Banyak tersangka yang nanya apakah akan langsung ditahan atau tidak. Tapi saya jawab tidak tahu," ujarnya.

Kasus perjalanan dinas fiktif ini berawal saat Pemkab Gianyar melakukan studi banding ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat. Namun kenyataannya, empat tersangka malah diketahui *melali* (jalan-jalan) ke Thailand dan sisanya ke Jakarta dan Bogor. Akibat perbuatan para tersangka tersebut, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 94 juta lebih.

Sebanyak 14 tersangka yang dirilis Kejati Bali, masing-masing Dewa Made Putra jabatannya Sekretaris Camat Tampaksiring, Ketut Ritama Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban Kecamatan Ubud, Sang Ayu Made Ika Kencana Dewi Staf Camat Tampaksiring, Ni Ketut Juniantari Staf Dinas Perhubungan, dan I Ketut Puja Staf Camat Tegallalang.

Tersangka selanjutnya, yakni I Made Darmaja Staf Camat
Gianyar, Komang Yastara Staf
Camat Gianyar, I Made Wirawan
PNS Pendam, I Nyoman Sulandra
Staf Camat Ubud, Ni Wayan Suciasih jabatan PNS Pemkab Gianyar,
Ni Ketut Suniawati jabatan Staf
Bagian Hukum Pemkab Gianyar,
Ni Made Ayu Purniasih staf
Pemkab Gianyar, AA Istri Agung
Yunariawati PNS Camat Gianyar
dan I Made Suparta PNS Dinas
Pendapatan Gianyar. Fez

Edisi : Rabu, 28 Eulober 2017
Hal : 3

NUS2 Balf



Jumlah Tempat Tidur Masih Terbatas

Kondisi RSUD Mangusada Badung

"Tempat tidur pasien kelas I, II, dan III, sekarang masih kurang. Sekarang rumah sakit cuma punya seratusan tempat ditur, jadi masih kurang banyak" (Wakil Ketua II DPRD **Badung Made Sunarta)**

MANGUPURA, NusaBali

Dengan gedung megah dan memiliki peralatan medis memadai, terutama pada kelas VIP, VVIP dan Super VVIP di Gedung Paviliun, ternyata tak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan untuk kelas III, II, dan I di RSUD Mangusada Badung. Bahkan untuk kelas pelayanan yang banyak dimanfaatkan masyarakat me-nengah ke bawah tersebut, jumlah tempat tidur pasien (hospital bed) masih sangat terbatas. Tak cukup ideal pula dengan membludaknya pasien rumah sakit setiap harinya.

Fakta ini terungkap saat Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta melakukan peninjauan kesiapan rumah sakit jelang pembukaan pelayanan pada Gedung Paviliun, untuk kalangan menengah ke atas, Selasa (27/10)



ANGGOTA Dewan Badung saat meninjau Gedung Paviliun RSUD Mangusada, Selasa (27/10)

sekitar pukul 10.00 Wita. Sunarta sekitar pukul 10.00 Wita. Sunarta juga didam ping anggota Dewan Komisi IV B Sunartha. "Tempat tidur kelas I, II, dan III, sekarang masih kurang. Sekarang rumah sakit cuma punya seratusan tempat ditur, jadi masih kurang banyak," kata Sunarta yang juga Bendesa Adat Abianbase, Kelurahan Kapal, Mengwi, diselasela peninjayan. sela peninjauan.

Atas temuan itu, kalangan dewan menaruh keprihatinan yang sangat tinggi. Pasalnya, Gedung Paviliun yang diperuntukkan pada pelayanan VIP, VVIP dan Super VVIP memiliki peralatan sangat memadai. "Ini akan jadi prioritas kami karena pelayanan kesehatan

adalah hak masyarakat," kata Sunarta yang kemarin disambut Dirut RSUD Mangusada Badung dr Agus Bintang Suryadi. Untuk itu, pihaknya berjanji akan mengawal suksesnya pembangunan gedung baru, yakni gedung blok D. Kemungkinan bisa terlaksana pada tahun depan. Meskimengungkapkan keprihatinannya atas kekurangan tempat tidur pada kelas I, II, dan III, namun Sunarta mengaku bangga dan takjub dengan perubahan rumah sakit milik pemerintah ini. Menurutnya, dulunya RSUD kurang diminati masyarakat, tapi kini menjadi salah satu rumah sakit rujukan

hal 1

2015 Edisi

Hal

Nusa Balf



Sambungan

sejumlah kabupaten di Bali. Disela-sela melihat ruang operasi di Gedung Paviliun, Sunarta menyatakan bila fasilitas yang dipunyai RSUD Mangusada adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Bahkan di Asia pun hanya satu negara lagi yang punya fasilitas lengkap bertaraf internasional yakni Singapura. "Saya baru tahu dari pak dr Agus Bintang, bila rumah sakit memiliki fasilitas mirip yang ada Singapura. Ini luar biasa Badung bisa punya peralatan canggih" ucapnya

peralatan canggih," ucaprya.

Apa yang disebutkan Sunarta memang masuk akal, pasalnya anggaran yang disiapkan untuk peralatan ini senilai miliaran rupiah. Anggaran tersebut, diantaranya untuk menyediakan dua ruang operasi yang dilengkapi alat anastesi senilai Rp 2,3 miliar per unit, penyediaan ruang pemeriksaan MRI (Magnetic Resonance Imaging) untuk pemeriksaan radiologi yang menggunakan prinsip magnetsasi senilai Rp 17 miliar, dan Rp 3 miliar lebih untuk unit alat operasi jantung. "RSUD Mangusada sekarang tidak hanya rumah sakit besar, tapi sudah menjadi rumah sakit pilihan, jadi kami mendukung setiap pengembangan fasilitas kesehatan yang dilakukan," kata Sunarta.

Anggota Komisi IV IB Sunartha juga mengatakan hal yang sama. Terkait masalah kekurangan tempat tidur pasien untuk kelas I, II, III, dia juga mendukung adanya penambahan kamar untuk meningkatkan daya dukung, mengingat jumlah kamar yang tersedia saat ini belum mencukupi. Jumlah kamar yang tersedia saat ini yakni kelas 1 dua kamar, 24 kamar di kelas 2, dan 128 kamar di kelas 3. Sedangkan, untuk di gedung baru terdapat kamar VIP sebanyak 32 kamar, VVIP lima kamar, dan Super VVIP dua kamar. "Kalau memang membutuhkan kamar tambahan, kita bisa bangun lagi. Ini untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

gusada Badung dr Agus Bintang Suryadi, tidak membantah atas kekurangan tempat tidur pasien pada kelas I, II, dan III. "Memang betul, kami memang kurang banyak tempat tidur untuk kelas I, II, dan III. Idealnya tempat tidur itu 300-400. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ada pembangunan gedung D menutupi kekurangan yang ada," jelasnya. Saat ini, imbuh dr Agus Bintang, rata-rata per hari jumlah terus meningkat. Di poliklinik saja mencapai 500 orang perhari, UGD mencapai 75-125 perhari, dan rawat inap rata-rata penuh. Bahkan, banyak yang terpaksa dirawat di ICU," ujarnya. "Kalau dulu kamar penuh, pasien kami suruh mencari rumah sakit lain. Tapi sekarang kami yang menghubungi rumah sakit yang ada kemudian di rujuk kesana, imbuhnya. 🚎 as

. .

Edisi	:_	Rabn	, 20	out	70K	
Hal	:_	2-				

Nusaranium Balf



Warga Kubu Demo Proyek Mangkrak

Mereka datangi dewan untuk mempertanyakan tiga proyek jalan yang pengerjaannya di tahun 2014 hanya sekitar 30 persen.

AMLAPURA, NusaBali

Proyek mangkrak di tiga ruas jalan di Kecamatan Kubu, Karangasem memicu warga tersebut menggelar protes dengan berdemonstrasi ke DPRD Karangasem. Kedatangan mereka dipimpin sendiri oleh Ketua Forum Perbekel Kecamatan Kubu I Wayan Potag, untuk mencari tahu kelanjutan proyek jalan, yang mangkrak sejak tahun 2014, hingga masyarakat merasa

Sebab, setelah dalam proyek ini terpasang geladag, jalan justru menjadi licin, berlubang dan sulit



PERWAKILAN warga masyarakat salami Ketua DPRD I Nengah Sumardi (kanan) setelah dapat jaminan pengerjaan proyek jalan berlanjut tahun 2016, di DPRD, Selasa (27/10).

melintas mengendarai sepeda motor. Mestinya setelah gagal pengerjaannya tahun 2014, berlanjut di tahun 2015, kenyataannya tak kunjung se esai. Hal itu terungkap dalam dialog dengan dewan di diterima Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi didampingi Ketua Komisi II I Nyoman Mardana Wimbawa di Ruang Rapat DPRD, Selasa (27/10).

Kedatangan warga Desa Ban

dan warga Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu pukul 10.30 Wita, untuk mempertanyakan tiga proyek jalan yang pengerjaannya di tahun 2014 hanya sekitar 30 persen. Tiga ruas jalan itu jalan Banjar Delundungan-Banjar Darmaji (Desa Ban) panjang 3,9 kilometer nilai Rp 1,6 miliar. Jalan Banjar Muntigunung menuju Pura Puseh (Desa Tianyar Barat) senilai Rp

Edisi	: Rabu,	THE REPORT OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	Olef	2015	Automorphis
Hal		В			

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

NUSSBAIG



Sambungan

650 juta panjang 1,6 kilometer, dan jalan lingkar Pura Pasar Agung senilai Rp1,55 miliar.

I Ketut Karya dari Banjar Muntigunung, Desa Tianyar Barat mempertanyakan, kelanjutan proyek yang mangkrak itu. "Kenapa jalan lingkar itu tidak berlanjut, apa alasannya?" tanya I Ketut Karya.

Apalagi kata I Ketut Karya Desember 2015 segera turun hujan, bisa menyebabkan banjir, warga sulit melintas karena jalan berubah jadi licin dan berlubang. Warga I Made Cedang, dari Banjar Muntigunung Desa Tianyar Barat, juga mempertanyakan hal itu. "Sebelumnya pemerintah berjanji, melanjutkan pengerjaan proyek jalan yang gagal menu ntaskan di tahun 2014, dikerjakan tahun 2015. kenyataannya tidak ada tindaklanjut," katanya.

Perbekel Ban, I Wayan Potag juga mempertegas pertanyaan warganya. Sebab, semenjak jalan dilebarkan, dengan menimbun gunakan material, jalur menjadi licin karena banyak krikil. "Dulu bisa digunakan untuk akses kendaraan sepeda motor, kali ini sepeda motor sulit melintas, karena berdebu," ujar I Wayan Potag. Bahkan warga I Ketut Tiwas

Bahkan warga I Ketut Tiwas lebih sengit lagi. "Jangan hanya kembali berjanji pengerjaannya tahun 2016. Setelah tahun 2016 tiba, kembali tanpa realisasi. Kalau kembali gagal pengerjaannya, kami datang dengan jumlah warga lebih banyak," ancam I Ketut Tiwas dan I Ketut Rukit

Ketut Tiwas dan I Ketut Bukit.
Ketua DPRD I Nengah Sumardi memberikan jaminan, tahun 2016 proyek itu berlanjut, hal itu terungkap setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda I Ketut Sedana Merta. "Kami tidak mungkin mengkhianati masyarakat, kami tegaskan PU dan Bappeda telah menjamin pengerjaannya tahun 2016," kata Sumardi.

Sumardi juga meminta agar PU mengkaji ulang, agar tahun 2016 tidak lagi gagal dalam pengerjaan. Sedana Merta juga meyakinkan masyarakat berdasarkan aspirasi itulah menguatkan untuk melanjutkan pengerjaan proyek jalan tersebut. **** k16**

11

Edisi	:	Palou, 28	CKF	2011	
Hal	:	8	qualifyriae dan dae'n ar se dae'n ar se d	*******************************	